

# **JURNAL**

## **FAKTOR PENYEBAB ORANGTUA ATAU WALI DARI PECANDU YANG BELUM CUKUP UMUR TIDAK MELAPOR KEPADA INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR**

**(Study Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang)**

### **ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ADEYATMA PURNAMA**

NIM. 0910113062



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

## RINGKASAN

ADEYATNA PURNAMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, Faktor Penyebab Orangtua atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur Tidak Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (Study di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang), Dr. Ismail Navianto S.H M.H, Milda Istiqomah S.H MTCP.

kasus penyalahgunaan ini dari tahun ketahun selalu meningkat, penggunaanya juga bermacam-macam dan yang paling memprihatinkan narkotika mulai merambah ke anak-anak dibawah umur yakni usia di bawah 18 tahun, penyalahgunaan narkotika ini telah di atur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penulis mengangkat tema Faktor Penyebab Orangtua atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur Tidak Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Lapor di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang berlandaskan pada pasal 55 ayat 1 UU nomor 35 Tahun 2009. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini ialah mengetahui dan menganalisa faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu narkotika tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor dan untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur tidak melakukan wajib lapor kepada institusi penerima wajib lapor. Sehingga diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian empiris, karena akan melakukan kajian secara mendalam tentang faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu narkotika tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor. Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapangan dan *personal survey*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang terkait yakni antara lain Kepala BNN Kota Malang, Kasi Tata Usaha Pul, Olah dan Penyaji Prog Perencanaan BNN Kota Malang, Orangtua tau wali dari pecandu yang belum cukup umur dan Pecandu yang belum cukup umur.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor yakni aib, orangtua tidak tega melaporkan anaknya, takut anaknya di penjara dan takut sekolah anak berhenti jika melapor. Adapun upaya BNN dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor yakni memberikan sosialisasi tentang UU Nomor 35 Tahun 2009, mengenai wajib lapor, meningkatkan peran orangtua dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahayanya narkotika.

Kata Kunci : Faktor Penyebab, Orangtua atau Wali Pecandu, Tidak Melapor, Institusi Penerima Wajib Lapor.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Masalah narkoba di Indonesia telah menjadi masalah nasional, bahkan menjadi masalah global di dunia. Banyaknya korban akibat penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Sejarah penyalahgunaan obat narkotika dan obat berbahaya (narkoba) terjadi pada era tahun tujuh puluhan hingga sekarang, penyalahgunaan narkotika telah menyerang banyak kalangan, bahkan yang paling memprihatinkan narkoba sudah masuk di kalangan anak-anak dibawah umur seperti pelajar SMP dan SMA maka dari itu peran orangtua dalam membina dan mengawasi pergaulan dan perilaku anak-anak sangatlah penting bagi masa depan anak, akan tetapi apabila anak dibawah umur sudah menjadi pecandu narkotika orangtua cenderung enggan untuk melaporkan kepada institusi terkait dengan alasan beragam, mereka memilih merehabilitasi anaknya sendiri dengan metode atau tahapan-tahapan rehabilitasi yang tidak sesuai peraturan.

Dalam pasal 55 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*.<sup>1</sup>

Dalam penggalan pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa *“... pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah...”* dalam hal ini yang ditunjuk oleh pemerintah adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), dan sejak tahun 2007 Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah menyebar ke berbagai provinsi dan kota di Indonesia agar pencegahan dan penanggulangan narkotika dapat berjalan secara optimal.<sup>2</sup>

Melihat dari data tersebut jelas banyak orangtua atau wali dari pecandu dibawah umur enggan untuk melapor, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pasal 51 ayat 1 yang mengatur tentang wajib lapor terdapat sanksi

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

pidana apabila orangtua atau wali dari pecandu tidak melakukan wajib lapor, yaitu pada pasal 128 ayat 1 yakni *“Orangtua atau Wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) “.* <sup>3</sup> Berbagai macam upaya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang merengut berbagai lapisan masyarakat, maka dari itu upaya pencegahan baik dilakukan secara pengobatan ataupun merehabilitasi pengguna narkoba sangatlah penting mengingat dampak yang disebabkan karena narkoba sangat merugikan.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melakukan wajib lapor kepada institusi penerima wajib lapor?
2. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu narkoba dibawah umur tidak melakukan wajib lapor kepada institusi penerima wajib lapor?

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 128 ayat 1.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Mengenai Narkotika**

##### **2.1.1 Pengertian dan Sejarah Narkotika**

Pengertian tentang narkotika menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yakni Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>4</sup>

##### **2.1.2 Macam-macam Narkotika**

Berdasarkan pengertian narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan antara lain:

##### **1. Narkotika Golongan I**

Tidak digunakan dalam pengobatan karena mempunyai potensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Ganja, Heroin/Putaw, Cocain, Opium dan lain-lain.

##### **2. Narkotika Golongan II**

Digunakan dalam pengobatan tetapi memiliki potensi yang sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin dan lain-lain.

##### **3. Narkotika Golongan III**

Digunakan dalam pengobatan yang mempunyai potensi ringan dan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Codein, Etil Morfin dan lain-lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### **2.1.3 Tahap-tahap Pemakaian Narkotika**

Pada awalnya mereka hanya mencoba-coba dengan alasan untuk menghilangkan rasa susah, mencari rasa nyaman, enak atau sekedar memenuhi rasa keingin tahuan, adapun tahap-tahap pemakaian narkotika yaitu :

a) Tahap abuse :

Tahap ini menentukan apakah ia menjadi pengguna narkotika tetap atau tidak, pada tahap ini mereka tidak mempunyai pegangan, dalam keadaan lepas kontrol dan saat narkotika itu mengambil alih kontrol munculah ketergantungan.

b) Tahap kecanduan:

Tahap kecanduan ini berkelanjutan, jadi pemakai akan terus menerus menggunakan narkotika karena sudah melewati tahap abuse dalam tahap ini tubuh menjadi terbiasa dan timbul untuk keinginan menambahkan dosis, tahap inilah yang paling berbahaya karena pecandu akan melakukan apapun untuk memperoleh narkotika.<sup>6</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN)**

### **2.2.1 Pengertian dan Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non-struktural di [Indonesia](#) yang bertanggung jawab langsung kepada [Presiden Republik Indonesia](#), BNN ini merupakan lembaga yang kini sudah menyebar ke berbagai provinsi dan kota di seluruh Indonesia. Jika di provinsi dinamakan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), jika di kota BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota).<sup>7</sup>

### **2.3 Tinjauan Umum Mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 55 ayat 1 orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor, jadi dalam hal ini Institusi Penerima

---

<sup>6</sup> Drs.Hari Sasangka,SH.,M.H,*Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 8.

<sup>7</sup> Wawancara dengan AKBP Henry Budiman,S SoS, MM,Pengertian BNN, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, tanggal 15 Oktober 2012

Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Institusi Penerima Wajib Lapor wajib memiliki persyaratan yakni memiliki tenaga kerja yang ahli di bidang ketergantungan narkoba dan sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis maupun standar rehabilitasi sosial,<sup>9</sup> tugas dari Institusi Penerima Wajib Lapor yakni :

1. Menerima pelaporan dari pecandu narkoba
2. Melakukan pendataan kepada pecandu narkoba
3. Melakukan asesmen kepada pecandu narkoba guna mengetahui kondisi pecandu narkoba
4. Melakukan rangkaian pengobatan dan perawatan guna pemulihan pecandu narkoba berdasarkan rencana rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social
5. Melaporkan informasi pecandu narkoba kepada kementrian terkait
6. Melaksanakan tugas dan ketentuan lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor.

## **2.4 Tinjauan Umum Mengenai Wajib Lapor**

### **2.4.1 Pengertian Wajib Lapor**

Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>10</sup>

### **2.4.2 Tata Cara dan Prosedur Wajib Lapor**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 pada Bagian Ketiga Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba menjelaskan Tata Cara Wajib Lapor, dimana wajib lapor dilakukan oleh orangtua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor

<sup>9</sup> Wawancara dengan AKBP Henry Budiman, S SoS, MM, Pengertian BNN, Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Malang, tanggal 15 Oktober 2012

<sup>10</sup> Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib Lapor Pecandu Narkoba

dan pecandu narkoba yang sudah cukup umur selanjutnya Institusi Penerima Wajib Laporkan melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba. Asesmen adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter dari Badan Narkotika Nasional meliputi aspek medis maupun aspek sosial untuk mengetahui kadar ketergantungan pecandu narkoba.<sup>11</sup>

Asesmen itu dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik maupun psikis terhadap pecandu narkoba, wawancara yang dilakukan meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, perilaku pecandu narkoba, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkoba. Hasil dari asesmen merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dimana rencana rehabilitasi ini sudah diketahui oleh pecandu narkoba dan pihak keluarga dari pecandu narkoba dan Badan Narkotika Nasional. Pecandu narkoba yang telah melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Laporkan akan mendapatkan kartu lapor diri dan selanjutnya kartu lapor tersebut digunakan pecandu narkoba untuk wajib lapor. Dalam melaksanakan wajib lapor, pecandu narkoba akan menerima berbagai rangkaian pengobatan dan perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkoba berdasarkan rehabilitasi. Terapi untuk pecandu narkoba ini ada berbagai macam tergantung dari kadar ketergantungan seorang pecandu tersebut terhadap narkoba, terapinya yakni pengobatan dan perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, perawatan terapi berbasis komunitas, terapi melalui pendekatan keagamaan.

## **1.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak di Bawah Umur**

### **2.5.1 Definisi anak secara sosiologis**

Pengertian mengenai anak sangat beragam dan berbeda-beda. Baik pengertian menurut undang-undang maupun pengertian dari beberapa tokoh. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (secara amental, fisik belum dewasa).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Yudhi, Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 24 Juli 2013.

<sup>12</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, halaman 50.



### 2.5.2 Definisi anak secara yuridis

Dalam perangkat perundang-undangan di negara kita terdapat perbedaan pengertian anak, perbedaan pengertian ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan dari adanya undang-undang tersebut.

### 2.6 Tinjauan Mengenai Teori Kriminologi

Dalam kaitannya terhadap teori kriminologi dengan faktor orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang tidak melapor yaitu :

#### 2.6.1 Teori Asosiasi Diferensial atau *Differential Association Theory*

Teori Asosiasi Diferensial atau *Differential Association Theory* dikemukakan pertama oleh seorang ahli sosiologi Amerika yaitu E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology* menurut Sutherland terdapat dua versi teori Asosiasi Diferensial atau *Differential Association Theory*, yang pertama yakni dalam buku *Principles of Criminology* menunjuk pada *Systematic criminal behavior*, dan memusatkan perhatian pada *cultural conflict* (konflik budaya) dan *Social disorganization* serta *Differential Association*, namun pada akhirnya Sutherland tidak lagi memusatkan pada *Systematic criminal behavior* tetapi dengan membatasi uraiannya pada diskusi konflik budaya.<sup>13</sup>

#### 2.6.2 Teori Labeling atau *Labeling Theory*

Dalam teori labeling ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lain, jika teori-teori lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif, para penganut teori labeling ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat pada suatu perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar peraturan tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sitem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.<sup>14</sup> Menurut Frank Tannenbaum (1938), kejahatan bukan sepenuhnya dikarenakan individu kurang mampu menyesuaikan diri dengan kelompok, tetapi dalam kenyataannya, individu tersebut telah dipaksa untuk menyesuaikan diri

---

<sup>13</sup> Prof.Dr.H.Romli Atmasasmita S.H., LL.M, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 23 dan 24

<sup>14</sup> Ibid, halaman 98.

dengan kelompoknya, oleh karena itu, kejahatan terjadi karena hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku mana yang layak. Dilihat dari perspektif ini bahwa perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosialnya lah yang signifikan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang didasarkan atas data yang diperoleh berdasarkan observasi, karena akan melakukan kajian mendalam tentang tindak pidana Narkotika terutama faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang.

##### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapangan dan *personal survey*. Pendekatan yuridis yakni mengkaji pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji langsung tentang bagaimana penerapan pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta yang kemudian dari fakta tersebut muncul suatu permasalahan dan kemudian menuju identifikasi masalah serta menuju pada penyelesaian masalah.

##### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah kota Malang yakni yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang.

##### **D. Jenis dan Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama,<sup>15</sup> adapun sumber data yang di peroleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yakni mengacu pada hasil wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Naional (BNN) Kota Malang dan Kasi Tata Usaha PUL olah dan Penyaji Program Perencanaan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, halaman 12.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya. Dimana data sekunder ini berupa peraturan-peraturan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- f. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika.

### **E. Populasi, Sampel dan Responden**

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis atau hasil pengukuran yang dibatasi oleh kriteria tertentu.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang terkait yakni antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dan orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Selanjutnya sampel penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* atau sampel bertujuan, adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sampel berhubungan langsung dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis, yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, Kasi Tata Usaha PUL olah dan Penyaji Program Perencanaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, Orangtua atau

---

<sup>16</sup>Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman. 72

wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur, Pecandu narkoba yang belum cukup umur.

Responden penelitian ini adalah Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Malang, Kasi Tata Usaha PUL olah dan Penyaji Program Perencanaan Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Malang, sebanyak 1 orang, Orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur, sebanyak 3 orang, Pecandu narkoba yang belum cukup umur, sebanyak 1 orang.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik memperoleh data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan, yaitu:

- a. Data primer diperoleh melalui beberapa tahap, antara lain wawancara, dokumentasi, dan observasi.
- b. Data sekunder : dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu antara lain dengan membaca, menulis, dan menganalisis hasil wawancara.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Untuk data primer menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari fakta yang ada di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Orangtua Atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur Tidak Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.

Guna mengetahui realita penyalahgunaan narkoba di kota malang dapat dilihat dari hasil data ungkap kejahatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang tabel berikut ini.

Tabel 1

Kasus Narkotika yang berhasil di himpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang tahun 2011

Usia	Jan	feb	Mar	Apr	Mei	jun	jul	Ags	Sep	Okt	nov	des	Jumlah
< 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-20	1	1	0	3	0	2	1	2	1	0	0	1	11
21-30	0	4	4	2	0	6	1	3	5	2	1	0	28
31-40	0	1	2	0	4	1	0	2	0	1	2	0	13
41-50	1	0	1	1	2	0	1	0	0	2	1	0	9
<b>TOTAL</b>													<b>62</b>

Sumber data sekunder 2012

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa, pada tahun 2011 dari bulan Januari hingga Desember jumlah penyalahgunaan narkoba yang berhasil di himpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang sebanyak 62 (enam puluh dua) orang, dimana kasus terbanyak penyalahgunaan narkoba pada usia 21-30 tahun sebanyak 28 orang, dan penyalahgunaan narkoba di usia 15-20 tahun sebanyak 11 (sebelas) orang, usia 31-40 tahun 13 (tiga belas) orang dan usia 41-50 tahun sebanyak 9 (Sembilan) orang.<sup>17</sup>

Tabel 2

Kasus Narkotika yang berhasil di himpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

Kota Malang tahun 2012

Usia	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	jul	ags	Sep	Okt	nov	des	Jumlah
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

<sup>17</sup> Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 20 Desember 2012

< 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-20	0	0	3	1	0	2	0	1	1	0	0	1	9
21-30	4	3	3	2	1	5	2	1	3	0	0	2	26
31-40	2	0	4	1	0	0	3	2	1	6	3	2	24
41-50	0	0	1	3	2	1	1	2	2	0	3	0	15
<b>TOTAL</b>													<b>74</b>

Sumber data sekunder 2012

Berdasarkan tabel 2 pada tahun 2012 kasus penyalahgunaan narkotika meningkat menjadi 72 (tujuh puluh dua) orang disbanding pada tahun 2011 yakni berjumlah 62 (enam puluh dua) orang, pada tabel 2 jumlah penyalahgunaan narkotika pada usia 15-20 tahun terdapat 9 (sembilan) anak dibawah umur yang menjadi pecandu narkotika menurun di banding tahun 2011. Pecandu pada usia 15-20 tahun status pendidikannya adalah masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan anak putus sekolah.<sup>18</sup>

Dari kedua tabel diatas bahwa penyalahgunaan narkotika semakin tahun semakin meningkat dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden yakni 3 orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, menjelaskan berbagai alasan faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yakni :

a. Faktor Internal :

Faktor internal dari orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada kepada Institusi Penerima Wajib Lapor adalah

1. **Aib**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aib bisa merupakan suatu perbuatan atau celaan yang membuat rasa malu pada diri seseorang, aib merupakan alasan utama dalam diri orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melakukan wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (BNNK Malang), menurut hasil wawancara dengan responden mereka tidak melaporkan anaknya ke IPWL (BNNK Malang) karena mereka menganggap ini

<sup>18</sup> Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 20 Desember 2012

merupakan aib anaknya beserta keluarga di masyarakat dan akan berdampak buruk bagi kondisi psikologis anak;

2. **Orangtua dari anak pecandu narkoba tidak tega untuk melaporkan anaknya.** Sebagai orangtua/wali dari seorang anak yang menjadi pecandu narkoba merupakan suatu penderitaan bagi orangtua/wali dan keluarga. Pecandu narkoba bukan saja menimbulkan aib anak dan keluarga tetapi menjadi beban sosial dalam bentuk kerugian oleh karena lemahnya atau rusaknya salah seorang anggota keluarganya.

b. Faktor Eksternal :

Faktor eksternal dari orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada kepada Institusi Penerima Wajib Lapor adalah

1. **Orangtua atau wali takut anaknya akan di penjara setelah melapor,** perlu diketahui bahwa seseorang yang sudah menjadi pecandu narkoba apabila langsung melaporkan ke BNNK Malang yakni selaku Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) maka oleh BNNK Malang akan segera di tindak lanjuti sesuai peraturan yakni IPWL akan melakukan asesmen kepada pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu, asesmen ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap pecandu, observasi atas perilaku pecandu serta pemeriksaan fisik dan psikis pecandu narkoba, dan setelah melakukan asesmen akan di berikan kartu lapor diri.<sup>19</sup>
2. **Takut apabila melapor dan menjalani rehabilitasi anaknya akan berhenti sekolah.** Menurut hasil wawancara terhadap responden yakni orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur, rata-rata usia anaknya 18 (tahun) kebawah jadi orangtua pecandu menganggap apabila anaknya menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, jenjang pendidikan anaknya akan berhenti dan berdampak buruk pada masadepan anak, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba menyebutkan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 20 Desember 2012.



tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua/wali atau keluarga dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) akan merujuk institusi yang memiliki kemampuan tersebut,<sup>20</sup> jadi pecandu yang menjalankan rehabilitasi medis berupa terapi sesuai dengan rujukan dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) serta permintaan pecandu, orangtua/wali atau keluarga dapat melakukan kegiatan sekolah sesuai dengan jadwal anak.<sup>21</sup>

#### **B. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang Dalam Menanggulangi Faktor Penyebab Orangtua Atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur Tidak Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.**

Melihat dari faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Malang yakni yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang selaku institusi yang berwenang dalam kasus penyalahgunaan narkotika selain melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang juga melakukan upaya untuk menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) karena dari data yang di himpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dari tahun 2011 dan 2012 kasus penyalahgunaan narkotika pada usia 15-20 tahun menjadi permasalahan serius di kota Malang.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden, serta mengacu pada pendapat para ahli, upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu :

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 20 Desember 2012.

<sup>22</sup> Wawancara dengan AKBP Hennry Budiman, S SoS, MM, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 28 Februari 2013.

**1. Memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba:**

Dari hasil wawancara dengan responden bahwa mayoritas orangtua atau wali dari pecandu narkoba masih belum mengetahui dan memahami Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba khususnya mengenai wajib lapor pada pasal 55 ayat 1 (satu) yakni *“Orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*<sup>23</sup> dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba perlu adanya peran orangtua/wali guna membantu pemerintah agar lebih optimal, peran orangtua/wali ini sangatlah sentral yakni tanggung jawab, pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya karena orangtua/wali serta keluarga sebagai unit kecil dalam masyarakat yang merupakan wadah utama dalam proses pembelajaran anak menuju kepribadian yang dewasa, orangtua/wali serta keluarga merupakan benteng utama yang dapat mencegah anak dari masalah narkoba.<sup>24</sup>

Selain pasal 55 ayat 1 responden juga belum mengetahui dan memahami sanksi pidana apabila tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL), dalam hal ini terdapat pada pasal pasal 128 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yakni *“Orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 yang sengaja tidak melapor, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*<sup>25</sup>.

**2. Memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur mengenai wajib lapor, tata cara wajib lapor serta rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial**

**a. Wajib Lapor**

---

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 55 ayat 1.

<sup>24</sup> Badan Narkoba Nasional, *Modul Untuk Remaja Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*, Jakarta, 2009, halaman 46.

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 128 ayat 1.

Dalam upaya menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang melakukan upaya memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, bahwa orang tua atau wali dari pecandu awalnya harus mengetahui mengenai wajib lapor serta institusi penerima wajib lapor.

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah,<sup>26</sup> wajib lapor ini dilakukan oleh orangtua/wali dari pecandu yang belum cukup umur

Tujuan dari wajib lapor adalah :

1. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. mengikut sertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
3. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

b. Tata Cara Melakukan Wajib Lapor

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika terlebih dahulu petugas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar kinerja petugas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dapat berjalan secara maksimal,<sup>27</sup> mulanya petugas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) melakukan asesmen terhadap

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

<sup>27</sup> Wawancara dengan AKBP Henry Budiman, S SoS, MM, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 28 Februari 2013.

pecandu narkoba yang sebelumnya sudah di laporkan oleh orangtua/wali, asesmen meliputi aspek medis dan aspek sosial yakni :

1. Petugas Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) melakukan wawancara yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat pada tindakan kriminalitas, riwayat psikiatrik serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkoba;
2. Observasi, observasi ini meliputi tingkah laku pecandu narkoba, tingkah laku pecandu narkoba ini cenderung memiliki tingkah laku yang antisosial;
3. Pemeriksaan Fisik dan Psikis Pecandu Narkoba, pemeriksaan fisik dan psikis ini dilakukan oleh dokter dan psikiater yang sudah di siapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>28</sup>

Hasil dari asesmen akan dijaga kerahasiaannya oleh petugas Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib laporkan pecandu narkoba pasal 9.

### **3. Meningkatkan peran orangtua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba**

Perlu di ingat bahwa peran orangtua/wali dan keluarga sangatlah penting, sebagai langkah awal mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur serta di dukung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang agar lebih optimal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya meningkatkan peran orangtua/wali yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yaitu :

#### **a. Luangkan waktu untuk anak**

Terkadang orangtua terlalu sibuk akan pekerjaan dan urusan masing-masing sehingga tidak ada waktu bersama anak-anak, meluangkan waktu untuk anak memang sangat penting. Dalam kesibukan rutin yang dilakukan oleh orangtua, terkadang orangtua lupa untuk meluangkan waktu bersama anak-anak, padahal tujuan meluangkan waktu dengan anaknya yaitu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Anak yang merasa tidak bisa berkomunikasi dengan orangtuanya biasanya berpaling ke luar (pergaulan) dan hal ini bisa membawa dampak negatif terhadap mereka, istilahnya jadilah pendengar yang baik bagi anak.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 28 Februari 2013.

b. Orangtua sebagai contoh teladan bagi anak

Orangtua yang biasa menyalahgunakan alkohol dan rokok, dapat mempengaruhi untuk ikut menyalahgunakan zat tersebut. Jika ayah dan ibunya adalah seorang pemabuk, kemungkinan besar anaknya akan menjadi pengguna alkohol.

c. Orangtua sebagai pendidik pencegahan narkoba

Beberapa informasi penting mengenai hal ini perlu di pelajari oleh orangtua, misalnya bahwa penggunaan minuman keras dan penyalahgunaan narkoba dapat merugikan dan mencederai diri sendiri maupun orang lain. Bahwa bagi anak-anak narkoba dapat menghambat pertumbuhan dan merusak sel-sel saraf pada otak bahkan menyebabkan kematian serta penyalahgunaan narkoba ini melanggar hukum.

d. Orangtua sebagai pengawas

Walaupun kegiatan orangtua sibuk akan tetapi perlu di ingat bahwa orangtua harus mengetahui :

1. Siapa saja teman anaknya;
2. Kemana mereka pergi;
3. Apa kegiatan anak.

Keluarga perlu membentuk kebijaksanaan/peraturan keluarga yang jelas. Anak-anak akan menjadi lebih bertanggung jawab apabila orangtua menegakkan keterbatasan terhadap kegiatan atau kelakuan mereka, seperti waktu pulang ke rumah, penggunaan uang saku, dan sebagainya. Dengan pengaturan anak akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Perlu jelas bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang dalam keluarga dan ada konsekuensi hukumnya apabila menyalahgunakan narkoba.

**4. Menekankan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkoba**

Masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Malang pada umumnya masih tetap penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur, dan mereka rata-rata masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekolah, dimana anak-anak pada umumnya berada 5-6 jam per hari, merupakan potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi kehidupan anak-anak sehari-hari. Sebagai tempat anak-anak berkumpul dengan kelompok sebaya mereka, sekolah dapat menjadi suatu ajang pertukaran, pembagian, jual-beli, serta pengenalan terhadap penyalahgunaan narkoba yang paling efektif. Oleh karena itu upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang untuk memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkoba perlu di tingkatkan dengan mengadakan penyuluhan tentang narkoba yakni :

- a. Memberikan materi pencegahan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak sehat dan membahayakan semua orang bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- b. Materi yang di sampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yakni dengan mengemas materi berupa jenis-jenis narkoba, sejarah, farmakologi serta akibat-akibat sosial ekonominya, pendekatan yang paling efektif dengan membicarakan mengenai ketrampilan yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka dan memberikan jalan keluar di dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberikan materi tentang budi pekerti yang luhur serta agama yang merupakan benteng kuat dari pengaruh kehidupan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- d. Menekankan kepada anak tentang peningkatan kemampuan individu untuk pengambilan keputusan, menolak penawaran menggunakan narkoba oleh teman, peningkatan kemampuan mengatasi kesulitan atau permasalahan, cara mengatasi stress, dan kemampuan mengemukakan perasaan dan isi pikiran secara sehat.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang tentang “Faktor Penyebab Orangtua Atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur Tidak Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Lapor”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara terhadap responden yakni 3 (tiga) orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur dan 1 (satu) orang pecandu narkoba yang belum cukup umur, bahwa faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang yaitu:
  - a. Aib, aib merupakan suatu perbuatan atau celaan yang membuat rasa malu pada diri seseorang, orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melakukan wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (BNNK Malang) karena aib yang akan berpengaruh pada anaknya dan keluarga;
  - b. Orangtua atau wali dari pecandu takut anaknya akan di penjara setelah melapor, Mereka (orangtua pecandu) beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan anaknya adalah perbuatan yang melanggar hukum karena menyalahgunakan narkoba maka jika orangtua pecandu jika melapor kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang anaknya akan di penjara seperti narapidana-narapidana yang tertangkap karena kasus narkoba;
  - c. Orangtua dari pecandu takut apabila melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial anaknya akan berhenti sekolah. Dari hasil wawancara terhadap responden yakni orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur, rata-rata usia anaknya 18 (tahun) kebawah dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), jadi orangtua pecandu menganggap apabila anaknya menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial jenjang pendidikan anaknya akan berhenti dan berdampak buruk pada masadepan anak;

- d. Orangtua tidak tega untuk melaporkan anaknya, dari hasil wawancara dengan responden bahwa melihat anaknya yang masih berusia di bawah umur (usia 18 tahun kebawah) dan masa depan anaknya masih panjang, orangtua enggan melapor karena tidak tega melaporkan anaknya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang serta wawancara terhadap responden yakni Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dan Kasi Tata Usaha PUL olah dan Penyaji Program Perencanaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang bahwa, upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu:
- a. Memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
  - b. Memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur mengenai wajib lapor, tata cara wajib lapor serta rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi social;
  - c. Meningkatkan peran orangtua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - d. Menekankan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkoba.

## **SARAN**

Saran dari peneliti kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dan orangtua yakni melihat kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin lama semakin memprihatinkan, khususnya pada anak usia 18 tahun kebawah (Masih belum cukup umur) perlu upaya yang lebih optimal dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dengan memberikan penyuluhan mengenai narkoba secara menyeluruh dan bertahap ke sekolah-sekolah di kota Malang dan kepada orangtua, agar lebih meningkatkan waktu luang bersama anak, membimbing dan mengawasi anak sekalipun orangtua sibuk dengan pekerjaan, karena perhatian orangtua menjadi hal yang paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.



